



**RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023**



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 54 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 JULI 2022

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023



**RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023**



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 54 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 581);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor);
31. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) **Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :**

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Bayu Asih
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
11. Dinas Pangan dan Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22. Dinas Perikanan dan Peternakan

23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Jatiluhur
31. Kecamatan Sukasari
32. Kecamatan Maniis
33. Kecamatan Tegalwaru
34. Kecamatan Plered
35. Kecamatan Sukatani
36. Kecamatan Darangdan
37. Kecamatan Bojong
38. Kecamatan Wanayasa
39. Kecamatan Kiarapedes
40. Kecamatan Pasawahan
41. Kecamatan Pondoksalam
42. Kecamatan Purwakarta
43. Kecamatan Babakan Cikao
44. Kecamatan Campaka
45. Kecamatan Cibatu
46. Kecamatan Bungursari
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 13 Juli 2022



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 13 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 54



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gandanegara No. 25 Purwakarta 41111
Telp. (0264) 200036/200038/200039 Faks. (0264) 200037 e-mail : info@purwakartakab.go.id
website : www.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor:

**TENTANG RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023
SEKRETARIS DAERAH**

Menimbang : bahwa dalam upaya untuk melaksanakan pembangunan daerah yang terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TNLRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104 , TNLRI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 18, TLNRI Nomor 4815);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 21, TLNRI Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 54);

14. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta tentang Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

1. Dengan Surat Keputusan ini ditetapkan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
2. Uraian mengenai Renja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Renja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan menjadi pedoman dalam penyusunan :

- a. RKA Sekretariat Daerah
- b. DPA Sekretariat Daerah
- c. Alat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Pasal 5

Kepala Sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini dengan kewajiban melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang.

Pasal 6

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal :
**PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**


NORMAN NUGRAHA
NIP. 19831117 200604 1 009

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Pasal 5

Kepala Sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini dengan kewajiban melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang.

Pasal 6

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal :
**PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NORMAN NUGRAHA
NIP. 19831117 200604 1 009

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Pasal 5

Kepala Sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini dengan kewajiban melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang.

Pasal 6

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada Tanggal :

**PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NORMAN NUGRAHA
NIP. 19831117 200604 1 009

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum.....	I - 1
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 4
1.3.1 Maksud	I - 4
1.3.2 Tujuan	I - 4
1.4 Sistematika Penulisan	I - 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KAB.PURWAKARTA	II - 1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SETDA Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II - 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SETDA	II - 21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SETDA	II - 44
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II - 44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II - 53
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SETDA	III - 1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III - 1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SETDA	III - 9
3.3 Program dan Kegiatan SETDA	III - 10

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SETDA	IV - 1
BAB V	PENUTUP	V - 1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan di Setda Kabupaten Purwakarta s.d Desember 2021 II - 3
Tabel 2.2	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d Tahun 2021 di Setda Kabupaten Purwakarta II - 11
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Setda Kabupaten Purwakarta II - 42
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 II - 45
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 di Setda Kabupaten Purwakarta II - 53
Tabel 3.1	Arah Kebijakan, Pencapaian dan Major Project Nasional Tahun 2023 III - 5
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Setda Tahun 2019 – 2023 III - 10
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Setda Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 III - 16
Table 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Setda Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 IV - 2

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta	II - 40

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan sekretariat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 di Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan pada Tahun 2023.

Kami berharap Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta serta mendukung dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta, sehingga pembangunan di Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan lancar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 2022

**PJ. SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

NORMAN NUGRAHA
NIP. 19831117 200601 1 009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan sekretariat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 di Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan pada Tahun 2023.

Kami berharap Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta serta mendukung dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta, sehingga pembangunan di Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan lancar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 2022

**PJ. SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

NORMAN NUGRAHA
NIP. 19831117 200601 1 009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan sekretariat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 di Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan pada Tahun 2023.

Kami berharap Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta serta mendukung dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta, sehingga pembangunan di Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan lancar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 2022

**PJ. SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

NORMAN NUGRAHA
NIP. 19831117 200601 1 009

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 164, TLNRI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (LNRI Tahun 2007 Nomor 33, TLNRI Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (LNRI Tahun 2004 Nomor 45, TLNRI Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 139, TLNRI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (LNRI Tahun 2006 Nomor 96, TLNRI Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 21, TLNRI Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2019 Nomor 187);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

- tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023;
 23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
 24. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah agar dokumen perencanaan yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan oleh Sekretariat Daerah sehingga dapat mewujudkan sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2018 – 2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Terkait dengan Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Ketersediaan Dokumen Perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen Perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Seluruh Dokumen Perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2021 telah selesai dilaksanakan diantaranya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang telah ditetapkan

melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, pelaksanaan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta (APBD Perubahan Tahun 2021) mencapai sebesar Rp 92.196.852.395,00 atau 92 % dari total anggaran yang dialokasikan yaitu Rp.100.138.432.900,00. Anggaran dan Realisasi Belanja dalam APBD Perubahan Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran adalah seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		1. Penyusunan Perencanaan Daerah	Dokumen Perangkat Daerah	30.000.000	27.000.000	90%
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		118.300.000	94.426.350	82%
		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100.000.000	7.000.000	47%
		4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		12.500.000	12.500.000	100%
		5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		12.500.000	7.000.000	49%
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja		50.000.000	13.806.400	28%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%
		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
		7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	10.275.500	41%
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.861.166.155	116.577.590	98%
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.000.000	57.965.738	86%
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000.000	56.780.645	90%
		4. Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	50.000.000	133.525.050	89%
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	150.000.000	37.231.614	74%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
		6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50.000.000	50.000.000	100%
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
		1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	75.000.000	77.210.095	62%
		2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	150.000.000	69.303.460	69%
		3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000.000	37.729.210	50%
	4. Administrasi				

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%	
	Kepegawaian Perangkat Daerah	1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	49.999.982	70.090.682	93%
		2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	306.880.000	303.600.000	99%
		3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	99.999.004	8.272.550	8%
		4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000	8.852.300	36%
		5.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	75.000.000	0	0%
		6.	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	99.949.806		100%
		7.	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	25.000.000	84.811.500	0%
		8.	Pemindahan Tugas ASN	49.995.685		13%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%
				3.600.000	
		9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.000.000	256.489.092	87%
		10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	149.884.466	145.879.800	98%
		11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	182.644.207	123.168.000	98%
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	299.906.002	265.390.567	78%
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.750.794.122	1.898.093.800	79%
		3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	199.976.972	239.578.750	86%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%
		4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.150.000.000	2.846.882.700	97%
		5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	349.986.759	399.348.800	100%
		6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	218.500	0	0%
		7. Penyediaan Bahan/Material	400.000.000	99.855.000	67%
		8. Fasilitas Kunjungan Tamu	400.000.000	399.470.800	100%
		9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399.856.000	302.919.391	67%
		10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	24.999.000	100%
		11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	75.000.000	74.855.000	100%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%
6. Pengadaan Milik Penunjang Barang Daerah	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.220.242.500	1.728.497.000	100%
		2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.360.588.000	0	0%
		3. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	15.000.000	15.000.000	100%
		4. Pengadaan Mebel	1.350.000.000	791.100.750	99%
		5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.235.711.963	896.081.880	62%
		6. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000	246.129.000	98%
		7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.599.000.000	1.286.909.500	98%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%
		8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.969.436	199.941.253	67%
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.994.849	0	0%
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.994.630.900	14.278.493.780	98%
		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	180.000.000	80%
		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.907.311.000	8.601.524.375	97%
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.999.240	281.267.340	72%
		2. Pemeliharaan Mebel	100.000.000	100.000.000	100%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	60.000.000	100%
		4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.266.250.000	1.481.492.018	75%
		5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	249.950.000	193.400.000	77%
		6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.925.000.000	3.358.095.401	98%
9. Administrasi dan Keuangan Operasional Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	926.424.685	0	100%
	2.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan	345.000.000	245.485.000	100%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%
		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
		3. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000	5.967.050	100%
		4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	921.260.000	491.927.829	100%
	10. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	634.624.000	634.106.350	100%
		2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	400.000.000	398.873.250	100%
		3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	350.000.000	348.960.450	100%
	11. Penataan Organisasi	1. Pengelolaan Kelembagaan	230.000.000	31.542.000	30%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%
		dan Analisis Jabatan			
		2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	250.000.000	24.751.750	33%
		3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	200.000.000	18.482.900	25%
		4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100.000.000	0	0%
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	270.000.000	121.736.789	83%
		1. Fasilitasi Keprotokolan	1.025.000.000	854.578.500	95%
		2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	800.000.000	482.415.900	82%
		3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	600.000.000	455.637.350	93%
	12. Pelaksanaan Protokol Komunikasi Pimpinan dan				

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Administrasi Pemerintahan				
	1. Administrasi Pemerintahan	1. Penataan Administrasi Pemerintahan	50.000.000	0	0%
		2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	250.000.000	131.028.450	92%
		3. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	400.000.000	276.165.950	79%
	2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12.973.500.000	2.846.420.560	91%
		2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	5.700.000.000	1.370.309.600	93%
		3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	7.516.151.000	1.136.752.050	94%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%
	3. fasilitasi dan Koordinasi Hukum Fasilitasi Kerjasama Daerah	1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	420.022.271	76%
		2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	600.000.000	369.098.122	64%
		3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	350.000.000	228.559.000	66%
		4. Fasilitasi Kerjasama Daerah	100.000.000	30.038.028	72%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100.000.000	38.342.350	38%
		2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	250.000.000	163.443.120	65%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%
		3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	125.000.000	90.425.700	72%
	2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	100.000.000	924.406.400	94%
		2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	250.000.000	585.726.650	90%
		3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	200.000.000	96.388.835	72%
	3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	950.000.000	625.595.512	83%
		2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	450.000.000	358.783.700	90%
		3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	350.000.000	124.900.000	81%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%
	4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1.	150.000.000	25.668.250	26%
		2.	150.000.000	19.019.000	19%
		3.	150.000.000	128.840.900	86%
		1.	325.000.000	305.477.950	96%
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			100.138.432.900	92.196.852.395	92%
JUMLAH TOTAL					

Sumber : LAKIP Sekretariat Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2021

Dari Tabel diatas diketahui bahwa terdapat 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Sub Kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran dibawah 80,00 %, mengingat sub kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lingkup kegiatan penunjang sehingga dalam pelaksanaannya selalu menyesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2021 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan.

Akan tetapi pada tahun anggaran 2021 di Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta terdapat juga 1 (Satu) Sub Kegiatan yang tidak diserap sama sekali, yaitu pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2021, maka perlu dicermati kembali Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 berdasarkan pada *outcome* setiap program sesuai dengan Formulir Evaluasi Pada Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Tabel 3.2
Realisasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD
S.D Tahun 2021 Di Sekretariat Daerah Kabupaten Purwokerto

No	Uraian /Bidang Uraian Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Tingkat Kinerja Capaian Program (Basis Perangko Daerah) Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020	Tingkat dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lela (n-2)			Tingkat Program, Kegiatan dan Job Keptuhan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD id Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Job Keptuhan id Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	Uraian Peningkatan Uraian Peningkatan									
B-01	Perencanaan									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	-	B	AA	125	B	AA	125
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelaksanaan Perkhataran	90%	-	90%	89%	99	90%	38%	42
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90%	-	90%	92%	102	90%	48%	53
		Jumlah Dokumen Yang Disusun	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	50
		Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	-
		Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	-
		Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	-
		Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	-
		Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	-	90%	93%	103	90%	43%	43
		Gaji dan Tunjangan PNS	44 Orang	-	44 Orang	40 Orang	91	40 Orang	40 Orang	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	-	90%	74%	82	90%	-	-
		Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang	-	6 Orang	-	-	10 Orang	-	-

	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Pegawai Bappeltabंगा	50 Orang	-	50 Orang	45 Orang	90	36 Orang	-	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	90%	-	90%	67%	74	90%	27%	30
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	13 Item	-	13 Item	13 Item	100	1 Paket	1 Paket	100
	2	Penyediaan Perawatan dan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	3 Item	-	3 Item	3 Item	100	1 Paket	1 Paket	100
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	29 Item	-	29 Item	29 Item	100	1 Paket	1 Paket	100
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK Yang Memadai Serta Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minum Rapat dan Tamu Kantor Bappeltabंगा	47 Item dan 800 Dus	-	47 Item dan 800 Dus	47 Item dan 800 Dus	100	2 Paket	2 Paket	100
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	7 Item	-	7 Item	7 Item	100	1 Paket	1 Paket	100
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Yang Ditasilitasi	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Yang Ditasilitasi	268 Kali	-	268 Kali	54 Kali	20	12 Bulan	6 Bulan	50
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah	90%	90%	-	90%	99%	110	90%	-	-
	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebelkur Bappeda dan Litbang Yang Dibutuhkan	2 Item	-	2 Item	2 Item	100	1 Paket	-	-
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor dan Penataan Ruang Anjip Bappeltabंगा	2 Paket	-	2 Paket	2 Paket	100	1 Paket	-	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang di Bappeltabंगा	90%	90%	-	90%	82%	91	90%	35%	39
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Material Yang Dibutuhkan dan Jumlah Surat Kabar Yang Dibutuhkan	750 Lembar dan 1 Item	-	750 Lembar dan 1 Item	640 Lembar dan 1 Item	85	350 Lembar	120 Lembar	34
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Item	-	2 Item	2 Item	100	12 Bulan	6 Bulan	50
	3	Penyediaan Jasa Perawatan dan Peralatan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perawatan dan Peralengkapan Kantor	6 Item	-	6 Item	6 Item	100	1 Paket	1 Paket	100
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Premi Aurami Bagi Pegawai Non PNS; Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor; Jumlah Tenaga Pilek Malaria; Jumlah Tenaga PTT; dan jumlah tenaga Pendamping	10 Orang, 3 Orang, 3 Orang, 1 Orang dan 3 Orang	-	10 Orang, 3 Orang, 3 Orang, 1 Orang dan 3 Orang	10 Orang, 3 Orang, 3 Orang, 1 Orang dan 3 Orang	100	10 Orang	10 Orang	100

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Bappeltbangda	90%	-	90%	100	90%	17 Unit Kendaraan	100	90%	4%	4
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan	17 Unit Kendaraan	-	100	17 Unit Kendaraan	17 Unit Kendaraan	100	23 Unit	3 Unit	13
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berhala Gedung Kantor dan Pemeliharaan Taman Halaman Gedung Kantor Bappeltbangda	1 Paket	-	100	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	-	-
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Yang Dibutuhkan	5 Item/Paket	-	100	5 Item/Paket	5 Item/Paket	100	1 Paket	-	-
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pemertase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	100%	-	100%	95	95%	100%	95	100%	62%	62
		Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan	94%	-	94%	94	88%	94%	94	95%	4%	4
		Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	94%	-	94%	77	72%	94%	77	95%	7%	7
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	-	100%	95	95%	100%	95	7 Dokumen	5 Dokumen	71
	1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Ujulan Perencanaan Yang Disusun	1 Dokumen	-	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	-
	2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	-	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	3	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	-	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	4	Pelaksanaan Murenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	-	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	5	Penyiapan Bahan Koordinasi Murenbang Kecamatan	Jumlah Bahan Koordinasi Murenbang Kecamatan Yang Disiapkan dan Jumlah Kecamatan Yang Dimonitoring Pelaksanaan Murenbang	1 Dokumen dan 17 Kecamatan	-	100	1 Dokumen dan 17 Kecamatan	1 Dokumen dan 17 Kecamatan	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun	2 Dokumen	-	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	50

2	Analisis Data dan Informasi Pemertintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Hasil Analisis Data dan Informasi Pemertintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	-	100%	72%	72	1 Dokumen	-
			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	-	100%	88%	88	2 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berhala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keterangan dan Bupati Purwakarta Yang Diusun dan Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan, Usulan Benama dan DAK	1 Dokumen dan 4 Dokumen	-	1 Dokumen dan 4 Dokumen	1 Dokumen dan 4 Dokumen	100	1 Dokumen	-
		Persentase Kesuksesan Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemertintahan dan Pembangunan Manusia	85%	-	85%	91%	107	87%	18%
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesuksesan Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemertintahan dan Pembangunan Manusia	85%	-	85%	86%	101	87%	17
		Persentase Kesuksesan Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85%	-	85%	87%	102	87%	50%
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemertintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemertintahan dan Pembangunan Manusia	100%	-	100%	91%	91	3 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemertintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-

2	Astistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang Disistemi	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	-
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	-
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Dokumen	-
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatnya Kualitas Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	-	100%	86	86%	4 Dokumen	-
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2	Astistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam) Yang Disistemi	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	-
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	-
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen	-	2 Dokumen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	-
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya Kualitas Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	-	100%	87	87%	4 Dokumen	-
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	-

2	Autansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkoat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkoat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam) Yang Disiapkan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkoat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkoat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Manusia)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-
3.05 Penelitian dan Pengembangan										
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Penelitian Pembangunan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	94%	-	94%	95	89%	95	95%	-
		Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis IPTEK Dalam Pembangunan Daerah	94%	-	94%	89	84%	89	95%	-
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	94%	-	94%	89	84%	89	-	-
1	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Kajian Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Pariwisata di Kabupaten Purwakarta dan Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	-	-
2	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang disusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	-	-
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	94%	-	94%	103	97%	103	2 Dokumen	-
1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	-	-
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	94%	-	94%	89	84%	89	1 Dokumen	-
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Kegiatan	-	3 Kegiatan	100	3 Kegiatan	100	1 Dokumen	-

Sedangkan untuk tahun berjalan yaitu sampai dengan Parsial I Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran mencapai sebesar Rp.11.736.621.130,00 terdiri atas 4 Program, 21 Kegiatan dan 97 Sub Kegiatan, dengan estimasi capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100,00 % serta tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 maupun perkiraan capaian Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

- a. Masih Terdapat Usulan Kegiatan yang Setelah Diinventarisasi Belum Sesuai Dengan Rencana Kegiatan yang Telah Dicanangkan Pada Renstra maupun Renja Sekretariat Daerah.
- b. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Belum Didukung Dengan Ketersediaan Data-Data Yang Memadai dan Sistem Kerja Stakeholder Pendukung Secara Optimal, Sehingga Berpengaruh Terhadap Kualitas Penyusunan Hasil Kajian.
- c. Masih Kurangnya Pemenuhan Akan SDM Aparatur Perencana Sekretariat Daerah yang Berkualitas Sehingga Berdampak Pada Kualitas Produk Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, maka pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta menyusun Strategi :

- a. Meningkatkan Kualitas Pemenuhan Manajemen Kebutuhan Kantor;

- b. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Baik, Berkualitas dan Sistematis; dan
- c. Menyediakan Kebutuhan Kajian Pembangunan Daerah dan Pengembangan Data Informasi Pembangunan Yang Akurat.

Dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pemenuhan Manajemen Kebutuhan Kantor;
- b. Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian/Sinkronisasi Antar Dokumen Perencanaan Daerah; dan
- c. Menyusun Kajian-Kajian Pembangunan Daerah dan Pengembangan Data Informasi Pembangunan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Purwakarta merupakan Unsur Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 249 Tahun 2021 mempunyai Tugas Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Diberikan Kepada Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b) pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d) pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau ketentuan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Purwakarta mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan; serta memberikan layanan administratif, dan melakukan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah.

2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat. Asisten Sekretaris Daerah terdiri atas :

a. Bagian Pemerintahan

- Bagian Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;

Bagian Pemerintahan terdiri atas:

b. Bagian Hukum :

- Bagian Hukum dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi;

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah

di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan ini terdiri atas :

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;

b. Bagian Administrasi Pembangunan

- Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

- c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

4. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah; yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum ini terdiri atas :

- a. Bagian Organisasi :
 - Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum; yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi;

b. Bagian Umum

- Bagian Umum dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum; yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;

c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

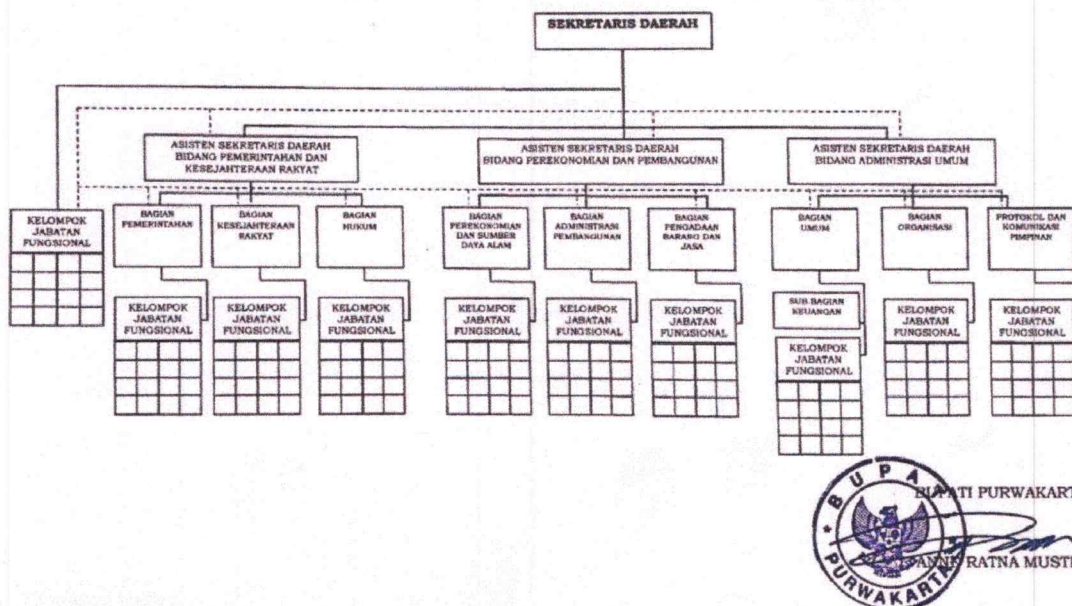
- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum; yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi (SEKRETARIAT DAERAH) Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 249 Tahun 2021 :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 227 TAHUN 2021
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



Sumber : SOTK Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Purwakarta telah menerapkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Berupa Penyediaan dan Penyusunan Dokumen-Dokumen Perencanaan Tingkat Kabupaten

Purwakarta, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. Sedangkan indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Persentase Capaian Program Prioritas Kabupaten Purwakarta Dalam RPJMD. Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; serta dokumen lainnya, guna mengukur seberapa besar capaian kinerja Perangkat Daerah yang dihubungkan dengan capaian Program Prioritas serta Visi-Misi Kabupaten Purwakarta dalam RPJMD.
2. Persentasi Kesesuaian Usulan Program/Kegiatan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan PD; Persentasi Kesesuaian Usulan Program/Kegiatan PD Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Lingkup Sarana dan Prasarana Wilayah, serta Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terhadap Dokumen Perencanaan PD; dimana Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja SEKRETARIAT DAERAH dalam menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

Berikut adalah Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta :

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

SEKRETARIAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Purwakarta tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain:

- 1.4. Mengikuti Pendidikan Lanjutan, Kursus, Pelatihan untuk Meningkatkan Profesionalisme Bidang Perencanaan Sehingga Dapat Menghasilkan Aparatur Perencanaan yang Kreatif dan Inovatif;
- 1.5. Menerapkan *Right Man On The Right Place* Dalam Penempatan/Perekrutan Aparatur. Hal ini Berdampak Pada Ketepatan dan Keakuratan Perencanaan, Mengingat Aparatur yang Dimiliki Lebih Responsive Terhadap Perkembangan Kebijakan Provinsi dan Nasional serta Menghasilkan Perencanaan Yang Akuntabel;
- 1.6. Mengembangkan Teknologi Informasi serta Perangkat Keras dan Kelengkapannya Dalam Mendukung Manajemen Pengelolaan Perencanaan yang Lebih Baik Dalam Menunjang Pembangunan;
- 1.7. Optimalisasi Perlengkapan dan Peralatan yang Memadai, serta Penambahan Ruangan untuk Memenuhi Standard Kelayakan Kerja.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purwakarta dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana

telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
seperti yang telah tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
 Review Terhadap Rancangan Awal
 RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Bahasan				Mekanismes Bina (Rp)				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lebid	Isu/tema	Target Capaian	Paga Indeks (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lebid	Isu/tema		Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	Uraian Program Perencanaan				18.472.094,230								
	Subkegiatan Daerah				18.472.094,230								18.472.094,230
1	Uraian Perencanaan				18.472.094,230								
	Uraian Perencanaan				18.472.094,230								
1	Program Pemangku Urusan Kesejahteraan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Terwujudnya Kualitas Pemangku Urusan Kesejahteraan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian RKPD Perangsat Daerah	81.643.689,669	Program Pemangku Urusan Kesejahteraan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Terwujudnya Kualitas Pemangku Urusan Kesejahteraan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian RKPD Perangsat Daerah	90%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Realisasi Kinerja Perangsat Daerah		Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Realisasi Kinerja Perangsat Daerah			Perencanaan, Penganggaran, dan Realisasi Kinerja Perangsat Daerah							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangsat Daerah	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah			40.000.000								40.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RMA-SKPD	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah			20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RMA-SKPD	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah						20.000.000
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RMA-SKPD	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah			20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RMA-SKPD	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah						20.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah			25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah						25.000.000
1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah			25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah						25.000.000
	Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah			25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah						25.000.000
1	Evaluasi Kinerja Perangsat Daerah	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah			20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah						20.000.000
	Administrasi Manajemen Perangsat Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengambilan Administrasi Manajemen Perangsat Daerah			Administrasi Manajemen Perangsat Daerah							

				Jumlah Pegawai Desain yang Diperkirakan	10 orang	250.000.000		Jumlah Pegawai Desain yang Diperkirakan	10 orang	250.000.000
Pembinaan Pegawai yang Desain	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah		Pembinaan Pegawai yang Desain	250.000.000	10 orang	250.000.000		Jumlah Pegawai Desain yang Diperkirakan	10 orang	250.000.000
Penyediaan dan Debatan Dogaal Berdasarkan Tujuan dan Fungsi	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah		Penyediaan dan Debatan Dogaal Berdasarkan Tujuan dan Fungsi	250.000.000	10 orang	250.000.000		Jumlah Pegawai Desain yang Diperkirakan	10 orang	250.000.000
Swakelola Perakutan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah		Swakelola Perakutan Perundang-Undangan	250.000.000	10 orang	250.000.000		Jumlah Pegawai Desain yang Diperkirakan	10 orang	250.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	10 orang	250.000.000		Jumlah Pegawai Desain yang Diperkirakan	10 orang	250.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah		Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	300.000.000	1 Paket	300.000.000		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	300.000.000
Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah		Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	1.000.000.000	15 Paket	1.000.000.000		Jumlah Paket Perawatan dan Perengkapan Kantor Yang Disediakan	15 Paket	1.000.000.000
Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah		Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	200.000.000	2 Paket	200.000.000		Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga Yang Disediakan	2 Paket	200.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000.000	2 Paket	1.000.000.000		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	2 Paket	1.000.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	400.000.000	2 Paket	400.000.000		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	400.000.000
Penyediaan Bahan Material	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah		Penyediaan Bahan Material	200.000.000	2 Paket	200.000.000		Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan	2 Paket	200.000.000
Facilitas Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah		Facilitas Kunjungan Tamu	400.000.000	2 Laporan	400.000.000		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	400.000.000
Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	500.000.000	4 Laporan	500.000.000		Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	4 Laporan	500.000.000
Perawatan Arip Drainasi Pada SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah		Perawatan Arip Drainasi Pada SKPD	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000		Jumlah Dokumen Perawatan Arip Drainasi Pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000

Pegawai Beres Mili Daerah Pemangjang Urusan Pemasalahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Beres Mili Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Beres Mili Daerah Pemangjang Urusan Pemasalahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Beres Mili Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Beres Mili Daerah Pemangjang Urusan Pemasalahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Beres Mili Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	1 Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.000.000.000	5 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	1 Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	2 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	2 Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	2 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah
Pengadaan Mebel	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	20 Unit	Pengadaan Mebel	1.500.000.000	20 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah
Pengadaan Perabotan dan Meubel Lainnya	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	20 Unit	Pengadaan Perabotan dan Meubel Lainnya	1.500.000.000	20 Unit	Jumlah Unit Perabotan dan Meubel Lainnya	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	1 Unit	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	250.000.000	1 Unit	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	1 Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.750.000.000	5 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	1 Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	4 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah
Pengadaan Jasa Pemangjang Urusan Pemasalahan Daerah			Pengadaan Jasa Pemangjang Urusan Pemasalahan Daerah				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Jasa Pemangjang di Kabupaten Daerah
Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	1 Laporan	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah
Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	1 Laporan	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.463.000.000	4 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah
Pengadaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	1 Laporan	Pengadaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	200.000.000	2 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah
Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	1 Laporan	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.000.000.000	2 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah
Pengadaan Beres Mili Daerah Pemangjang Urusan Pemasalahan Daerah			Pengadaan Beres Mili Daerah Pemangjang Urusan Pemasalahan Daerah				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Beres Mili Daerah Pemangjang Urusan Pemasalahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pagar dan Perawatan Laporan	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pagar dan Perawatannya	3 Laporan	400.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pagar Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dibayarkan Pagar dan Perawatannya	21 Unit	125.000.000
Pemeliharaan Mebel	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	100.000.000
Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	60.000.000	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	60.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	24 Unit	2.700.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	250.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	25 Unit	3.500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	200.000.000
Administratif Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Menyediakan Kualitas Administratif Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Administratif Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Menyediakan Kualitas Administratif Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/Bulan	1.642.248.998	Koordinasi Pengendalian Penerimaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penerimaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	150.000.000
Penyediaan Pakuan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Paket Pakuan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	345.000.000	Penyediaan Pakuan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Paket Pakuan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	345.000.000
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	60.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	60.000.000
Pemantauan Dana Pemeliharaan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Orang yang Memantau Dana Pemantauan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	760.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berhala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Menyediakan Kualitas Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung		Menyediakan Kualitas Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Paket	65.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Paket Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	65.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Paket Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	400.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Paket Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	400.000.000

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Selektasi Daerah	Kab. Purworejo, Purworejo, Nragri Tengah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Selektasi Daerah yang Disediakan	1 Paket	350.000.000		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Selektasi Daerah yang Disediakan	1 Paket	350.000.000
II	Program Organisasi									
	Perbaikan Kabinorganisasi dan Analisis Jabatan	Kab. Purworejo, Purworejo, Nragri Tengah	Perbaikan Kabinorganisasi	Jumlah Dokumen Pengolahan Kabinorganisasi dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	440.000.000		Jumlah Dokumen Pengolahan Kabinorganisasi dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	440.000.000
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Purworejo, Purworejo, Nragri Tengah	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	330.000.000		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	330.000.000
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Purworejo, Purworejo, Nragri Tengah	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	330.000.000		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	330.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Diseminasi Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Purworejo, Purworejo, Nragri Tengah	Monitoring, Evaluasi dan Diseminasi Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Diseminasi Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	220.000.000		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Diseminasi Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	220.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Purworejo, Purworejo, Nragri Tengah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	450.000.000		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	450.000.000	
III	Perencanaan, Pengabdian dan Kemasyarakatan Pimpinan									
	Fasilitas Kepraktisan	Kab. Purworejo, Purworejo, Nragri Tengah	Fasilitas Kepraktisan	Jumlah laporan hasil fasilitasi kepraktisan jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kepraktisan	1 Laporan	185.820.000		Jumlah laporan hasil fasilitasi kepraktisan jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kepraktisan	1 Laporan	185.820.000
	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Kab. Purworejo, Purworejo, Nragri Tengah	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	500.000.000		Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	500.000.000
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Purworejo, Purworejo, Nragri Tengah	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	500.000.000		Jumlah laporan pendokumentasian tugas jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	500.000.000
	Uraian Program Pemertahanan dan Kerjasama Rakyat						3.000.000.000			3.000.000.000
I	Administrasi Tata Pemerintahan									
	Perbaikan Administrasi Pemerintahan	Kab. Purworejo, Purworejo, Nragri Tengah	Perbaikan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Perubahan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	100.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Perubahan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	100.000.000

Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelakan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	300.000.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelakan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	300.000.000
Fasilitasi Pelayanan Calon Pemilih	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Fasilitasi Pelayanan Calon Pemilih	5 Dokumen	250.000.000	Fasilitasi Pelayanan Calon Pemilih	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelayanan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	250.000.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBAHARUAN									
1. Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan									
Fasilitasi Pelayanan Bina Mental Spiritual	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Fasilitasi Pelayanan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	4.300.000.000	Fasilitasi Pelayanan Bina Mental Spiritual	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelayanan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	4.300.000.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kelembagaan Sosial	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kelembagaan Sosial	12 Dokumen	3.200.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kelembagaan Sosial	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kelembagaan Sosial yang meliputi Penyelenggaraan, Pemertanian, Perencanaan Anak, Administrasi, Pengendalian Dan Perencanaan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Perilaku dan RB	12 Dokumen	3.200.000.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kelembagaan Masyarakat	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kelembagaan Masyarakat	8 Dokumen	4.300.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kelembagaan Masyarakat	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kelembagaan Masyarakat yang meliputi Penyelenggaraan, Pemertanian, Perencanaan Anak, Administrasi, Pengendalian Dan Perencanaan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Perilaku dan RB	8 Dokumen	4.300.000.000
2. Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan									
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	4 Dokumen	550.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	4 Dokumen	550.000.000
Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	550.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum	3 Kasus	550.000.000
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelakan Informasi Hukum	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelakan Informasi Hukum	100 Dokumen	400.000.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelakan Informasi Hukum	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Produk Hukum dan Pengelakan Informasi Hukum yang didokumentasi	100 Dokumen	400.000.000
3. Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan									
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	5 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	5 Dokumen	100.000.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBAHARUAN									
1. Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan									
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	5 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kab. Purworejo, Purworejo, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	5 Dokumen	100.000.000

	Koordinasi, Sinerjisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengalihan BLMD dan BLUD	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinerjisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengalihan BLMD dan BLUD	1 Dokumen 2 Dokumen	150.000.000,00	Koordinasi, Sinerjisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengalihan BLMD dan BLUD	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinerjisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengalihan BLMD dan BLUD	1 Dokumen 2 Dokumen	150.000.000,00
	Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perencanaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	2 Laporan 2 Laporan	400.000.000,00	Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perencanaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	2 Laporan 2 Laporan	400.000.000,00
	Pencapaian dan Penguasaan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pencapaian dan Penguasaan Ekonomi Mikro Kecil dan Penguasaan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen 1 Dokumen	200.000.000,00	Pencapaian dan Penguasaan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pencapaian dan Penguasaan Ekonomi Mikro Kecil dan Penguasaan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen 1 Dokumen	200.000.000,00
2	Pembangunan Administrasi Pembangunan		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			Pembangunan Administrasi Pembangunan				
	Fasilitasi Pelayanan Program Pembangunan	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelayanan Program Pembangunan Dan/atau Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelayanan Program Pembangunan Dan/atau	3 Dokumen	17.787.241.852	Fasilitasi Pelayanan Program Pembangunan	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelayanan Program Pembangunan Dan/atau Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelayanan Program Pembangunan Dan/atau	3 Dokumen	17.787.241.852
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan	600.000.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan	600.000.000
	Pengalihan Evaluasi dan Penguasaan Pembangunan	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengalihan Evaluasi dan Penguasaan Pembangunan	1 Dokumen	400.000.000	Pengalihan Evaluasi dan Penguasaan Pembangunan	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengalihan Evaluasi dan Penguasaan Pembangunan	1 Dokumen	400.000.000
3	Pengalihan Pengalihan Barang dan Jasa		Meningkatnya Kualitas Pengalihan Barang dan Jasa			Pengalihan Pengalihan Barang dan Jasa				
	Pengalihan Pengalihan Barang dan Jasa	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengalihan Pengalihan Barang dan Jasa	250 Dokumen	500.000.000	Pengalihan Pengalihan Barang dan Jasa	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengalihan Pengalihan Barang dan Jasa	250 Dokumen	500.000.000
	Pengalihan Layanan Pengalihan Sewa Elektronik	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengalihan Sewa Elektronik	1 Dokumen	450.000.000	Pengalihan Layanan Pengalihan Sewa Elektronik	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengalihan Sewa Elektronik	1 Dokumen	450.000.000
	Pembinaan dan Adjuvansi Pengalihan Barang dan Jasa	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Adjuvansi Pengalihan Barang dan Jasa	15 Orang	350.000.000	Pembinaan dan Adjuvansi Pengalihan Barang dan Jasa	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Adjuvansi Pengalihan Barang dan Jasa	15 Orang	350.000.000
4	Pembinaan Kualitas Sumber Daya Alam		Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kualitas Sumber Daya Alam			Pembinaan Kualitas Sumber Daya Alam				
	Koordinasi, Sinerjisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengalihan BLMD dan BLUD	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinerjisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengalihan BLMD dan BLUD	1 Dokumen 1 Dokumen	100.000.000	Koordinasi, Sinerjisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengalihan BLMD dan BLUD	Kab. Purwokerto, Purwokerto, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinerjisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengalihan BLMD dan BLUD	1 Dokumen 1 Dokumen	100.000.000

	Koordinasi, Sinerjisasi dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia, Perencanaan, Statistik, dan Monitoring dan Evaluasi	Kab. Purworejo, Purworejo, Negeri Tengah	100.000.000	Koord. Sinerjisasi dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia, Perencanaan, Statistik, dan Monitoring dan Evaluasi	Kab. Purworejo, Purworejo, Negeri Tengah	100.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinerjisasi dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia, Perencanaan, Statistik, dan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen Dokumen	100.000.000
	Koordinasi, Sinerjisasi dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia, Perencanaan, Statistik, dan Monitoring dan Evaluasi	Kab. Purworejo, Purworejo, Negeri Tengah	100.000.000	Koord. Sinerjisasi dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia, Perencanaan, Statistik, dan Monitoring dan Evaluasi	Kab. Purworejo, Purworejo, Negeri Tengah	100.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinerjisasi dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia, Perencanaan, Statistik, dan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen Dokumen	100.000.000
URUTAN	PROGRAM PENGLOMPOKAN PERUSAHAAN								
	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan		
	Delegasi dan Peminoritasan Tugas dan Daerah	Delegasi dan Peminoritasan Tugas dan Daerah	1.402.860.000	Delegasi dan Peminoritasan Tugas dan Daerah	Kab. Purworejo, Purworejo, Negeri Tengah	1.402.860.000	Jumlah Tunas Bata Daerah yang Diprogramkan dan Dipelempar	1 Dokumen	1.402.860.000

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Purwakarta akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah terkait maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Berikut adalah Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 di Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta :

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023					
KABUPATEN PURWAKARTA					
Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta					
No	Program/Kegiatan	Lebasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam RPJMN 2020-2024 dimana terdapat **7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional** diantaranya yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda Pembangunan Nasional tersebut dalam pelaksanaan pembangunannya, difokuskan atau diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan daya ungkit besar terhadap pembangunan nasional serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Penjabaran dari 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas diantaranya yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. Memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan

- e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :

- a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. Revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c. Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- i. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu : **"Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Adapun Arah Kebijakan, Pencapaian dan Major Project Nasional Tahun 2023 digambarkan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Arah Kebijakan, Pencapaian dan Major Project Nasional Tahun 2023

No	Arah Kebijakan Nasional	Pencapaian Nasional	Major Project (MP) Nasional
1	2	3	4
1.	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	<ol style="list-style-type: none"> a. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Sebesar 1,5-2,0%; b. Proporsi Penduduk Yang Tercakup Dalam Program Jaminan Sosial Sebesar 91%; c. Nilai Tukar Petani Sebesar 103-105; d. Nilai Tukar Nelayan Sebesar 105-107. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; ▪ MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan); dan ▪ MP Wilayah Adat Papua, Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay

No	Arah Kebijakan Nasional	Pencapaian Nasional	Major Project (MP) Nasional
1	2	3	4
2.	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan SDM dan	a. Prevelansi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita Sebesar 17,5%; b. Insidensi TB 211 Per 100.000 Penduduk; c. Persentase Puskesmas Dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Sebesar 71%; d. Proporsi Pekerja Yang Bekerja Pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi Sebesar 43%; e. Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) (Dosen, Peneliti, Perekayasa) Berkualifikasi S3 Sebesar 17,48%; f. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Sebesar 9,24 Tahun; dan g. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT) Sebesar 31,89%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MP Reformasi Kesehatan Nasional; dan ▪ MP Reformasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Untuk Industri 4.0)

No	Arah Kebijakan Nasional	Pencapaian Nasional	Major Project (MP) Nasional
1	2	3	4
3.	Penanggulangan Pengangguran Disertai Dengan Peningkatan <i>Decent Job</i>	<p>a. Proporsi Pekerja Yang Bekerja Pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi Sebesar 43%;</p> <p>b. Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Ke Atas Sebesar 48%;</p> <p>c. Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika Yang Kompeten dan Profesional Sebanyak 50.000 Orang; dan</p> <p>d. Persentase Lulusan PT Yang Langsung Bekerja Dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan Sebesar 60,71%.</p>	
4.	Mendorong Pemulihan Dunia Usaha	<p>a. Pertumbuhan Wirausaha Sebesar 3,50%;</p> <p>b. Pertumbuhan PDRB Pertanian Sebesar 3,9-4,2%;</p> <p>c. Nilai Devisa Pariwisata Sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;</p> <p>d. Kontribusi PDB Pariwisata Sebesar 4,3%; dan</p> <p>e. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Sebesar Rp1.279 Triliun</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MP Destinasi Pariwisata Prioritas; dan ▪ MP Pengelolaan Terpadu UMKM

No	Arah Kebijakan Nasional	Pencapaian Nasional	Major Project (MP) Nasional
1	2	3	4
5.	Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertumbuhan Industri Pengolahan Sebesar 5,4-5,9%; b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan 20,6%; c. Produk Inovasi dan Produk Prioritas Riset Nasional Yang Dihasilkan Sebesar 10; d. Peringkat Global Innovation Index 75-80; e. Pertumbuhan PDB Industri Pengelolaan Non Migas Sebesar 5,55-6,6,08%; dan f. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas Sebesar 18,80% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter
6.	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim)	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sebesar 27,02%; b. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT-Kumulatif Sebesar 1.778,2 GW; c. Perusahaan Industri Menengah Besar Yang Tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) Berdasarkan SIH Yang Ditetapkan Sebesar 61 Perusahaan; dan d. Efisiensi Perusahaan Yang Menerapkan Industri Hijau Sebesar 6% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MP Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3; dan ▪ MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbaharukan dan Konservasi Energi

No	Arah Kebijakan Nasional	Pencapaian Nasional	Major Project (MP) Nasional
1	2	3	4
7.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Antara Lain : Air Bersih dan Sanitasi	a. Volume Tampung Air Per Kapita Sebesar 54,50 m ³ /detik; b. Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (82,07 Layak, Termasuk 11,5 Aman); c. Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak Sebesar 97,5%; d. Masyarakat Pengguna Internet Sebesar 80,7%; dan e. Kecamatan Yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik Kumulatif Sebesar 50%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; ▪ MP Transformasi Digital; ▪ MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; dan ▪ MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
8.	Pembangunan Ibu Kota Nasional (IKN)	a. Inisiasi Pembangunan KIPP-IKN Tahap 1A; dan b. Luas Area Pembangunan Ibu Kota Negara Seluas 5.600 Ha	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MP Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Sumber : Permendagri 81/2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2023

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Adapun Visi dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah **"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA."**

Sebagai bentuk perwujudan Visi, maka disusunlah Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional;
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan;
4. Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut maka Sekretariat Daerah mempunyai Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Capaiannya sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, seperti yang tersaji dalam Tabel berikut ini :

**TABEL PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

No	Indikator	SPM/Target Maksimal	IKK	Target Renstra Perangkuat Daerah					Realisasi Capaian			Prepektif		Cekatan Amaliah			
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023				
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	-	1. Penetapan Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Dihubungkan Terhadap Waktu dan Sifat Aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				87%	93%	94%	95%	96%	18%	88%	95%	96%	96%	96%	96%		
				6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	94%	95%	96%	-	72%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%
				80%	83%	-	-	-	-	-	168%	-	-	-	-	-	-
2	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	-	2. Penetapan Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi	80%	83%	-	-	-	-	101%	-	-	-	-	-		
				80%	83%	-	-	-	-	-	120%	-	-	-	-	-	
				80%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				80%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				80%	83%	85%	87%	89%	-	99%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	
3	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	-	3. Penetapan Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	80%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				80%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				80%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				80%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				80%	83%	85%	87%	89%	-	99%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	
4	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	-	4. Penetapan Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	80%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				80%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				80%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				80%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				80%	83%	85%	87%	89%	-	99%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	
5	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	-	5. Penetapan Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				80%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				80%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				80%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				80%	83%	85%	87%	89%	-	99%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	

3	Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah	-	-	85%	87%	89%	-	86%	87%	89%
6	Persentase Kesuksesan Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Rencana OPD Lingkungan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	-	-	85%	87%	89%	-	86%	87%	89%
7	Persentase Kesuksesan Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Rencana OPD Lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	85%	87%	89%	-	87%	87%	89%
1	Persentase Penyaliran Pembangunan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	-	93%	94%	95%	96%	27%	89%	95%	96%
2	Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis IPTEK Dalam Pembangunan Daerah	-	93%	94%	95%	96%	27%	84%	95%	96%
3	Tingkat Istimewaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	-	93%	-	-	-	86%	-	-	-

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Persentase Perangkat Daerah yang strukturnya sesuai dengan fungsi organisasinya	90	70	80	90	100
			Persentase dokumen ketatalaksanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi	100	80	90	100	100
			Persentase Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi	25	50	75	100	100
			Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	85,7 1	100	100	100	100
			Persentase produk hukum yang berkeadilan, efektif dan tepat sasaran	100	100	100	100	100
			Persentase peningkatan capaian kinerja pembangunan	25	50	50	75	100
			Optimalisasi pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa	100	100	100	100	100

			Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	90	90	100	100	100
			Persentase penyusunan anggaran yang tepat waktu dan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan	100	100	100	100	100
			Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	100	100	100	100
			Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	76,5 3	70	80	85	90

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Pada Tahun 2023 terdiri atas :

1.4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki Indikator : Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - f) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- ❖ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- ❖ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin pegawai
 - b) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - c) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - d) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - e) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - f) Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 - g) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - h) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - i) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f) Penyediaan Bahan/Material
 - g) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - j) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - d) Pengadaan Mebel
 - e) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - g) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - h) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Surat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

- b) Pemeliharaan Mebel
- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ❖ Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - b) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - c) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - d) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- ❖ Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - b) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - c) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- ❖ Penataan Organisasi , dengan Sub Kegiatan :
 - a) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - c) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - d) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah

- ❖ Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Fasilitasi Keprotokolan
 - b) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - c) Pendokumentasian Tugas Pimpinan

1.5. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini memiliki Indikator : Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Administrasi Tata Pemerintahan, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Penataan Administrasi Pemerintahan
 - b) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - c) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
- ❖ Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - b) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
 - c) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
- ❖ Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - b) Fasilitasi Bantuan Hukum
 - c) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
- ❖ Fasilitasi Kerja Sama Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

1.6. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini memiliki Indikator : Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran, dengan Kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - b) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - c) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
- ❖ Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - b) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - c) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- ❖ Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - b) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - c) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- ❖ Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - c) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

1.7. Program Pengelolaan Perbatasan

Program ini memiliki Indikator : Persentase Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Perbatasan dan Rupa Bumi Buatan dan Alam Yang Terdokumentasikan, dengan Kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan, dengan Sub

Kegiatan :

a) Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKETARIAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Bancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Pukiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kategori Sasaran	Pukiran Mula Rencana Tahun 2024		Penangkat Daerah Penanggung Jawab	
						TARGET 2023	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas
						Nasional	Daerah					
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	SENTRI/MAT DAERAH											
4	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH NABUWITEN/NOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opisic		Opisic	8 Opisic	78.884.819,558				8 Opisic	81.587.007,558
4	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				175.000.000						210.000.000
4	01	01	Perencanaan dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	40.000.000				3 Dokumen	45.000.000
4	01	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	20.000.000				1 Dokumen	25.000.000
4	01	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		20.000.000				1 Dokumen	25.000.000
4	01	01	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD		25.000.000				1 Dokumen	30.000.000
4	01	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		25.000.000				1 Dokumen	30.000.000
4	01	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Hitung Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Hitung Realisasi Kinerja SKPD		25.000.000				1 Laporan	30.000.000
4	01	01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.000.000				1 Dokumen	25.000.000
4	01	01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.550.000.000					22.550.000.000

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kategori Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penangkas Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			120 orang / bulan	20.000.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemertanian, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	120 orang / bulan	22.000.000.000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Akreditasi Keuangan SKPD			4 Dokumen	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen	100.000.000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 05	Kelembagaan dan Penguatan Laporan Keuangan ABR Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan ABR Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Jumlah Laporan Keuangan ABR Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			4 Laporan 0 Laporan	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemertanian, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	4 Laporan 0 Laporan	100.000.000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyajian Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Pemeriksaan			10 Dokumen 0 Dokumen	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemertanian, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	10 Dokumen 0 Dokumen	100.000.000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			0 Laporan 18 Laporan	200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemertanian, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	0 Laporan 18 Laporan	200.000.000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0 Dokumen 2 Dokumen	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemertanian, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	0 Dokumen 2 Dokumen	50.000.000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Keluaran Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Keluaran Barang Milik Daerah SKPD			4 Dokumen 0 Dokumen	450.000.000					4 Dokumen 0 Dokumen	450.000.000	
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Pencantuman Keluaran Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Keluaran Barang Milik Daerah SKPD			4 Dokumen 0 Dokumen	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemertanian, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	4 Dokumen 0 Dokumen	100.000.000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023

Kode	Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Penanggung Jawab	
						Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif			
									Nasional	Daerah						
4.01.01.2.05.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan			250.000.000		PENDANAAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemertajahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	6 Laporan	250.000.000	Sekretariat Daerah	5 Laporan	250.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan 0 Laporan			100.000.000		PENDANAAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemertajahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	4 Laporan 0 Laporan	100.000.000	Sekretariat Daerah	4 Laporan 0 Laporan	100.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah					1.600.000.000						1.600.000.000				
4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Digital Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Digital Pegawai	3 Unit 0 Unit 3 Unit			100.000.000		PENDANAAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemertajahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	3 Unit 0 Unit 3 Unit	100.000.000	Sekretariat Daerah	3 Unit 0 Unit 3 Unit	100.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaran Dinas Berserta Atribut Kepegawaiannya	Jumlah Paket Pakaran Dinas beserta Atribut Kepegawaiannya	10 paket			200.000.000		PENDANAAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemertajahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	10 paket	200.000.000	Sekretariat Daerah	10 paket	200.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengubahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengubahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengubahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen 0 Dokumen			100.000.000		PENDANAAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemertajahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	4 Dokumen 0 Dokumen	100.000.000	Sekretariat Daerah	4 Dokumen 0 Dokumen	100.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen 2 Dokumen			100.000.000		PENDANAAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemertajahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	0 Dokumen 2 Dokumen	100.000.000	Sekretariat Daerah	0 Dokumen 2 Dokumen	100.000.000	Sekretariat Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023**

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai	2 Dokumen			2 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	2 Dokumen	100.000.000	Sekretariat Daerah			
4.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Dipelembang	Jumlah Pegawai yang Dipelembang	10 orang			10 orang	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	10 orang	250.000.000	Sekretariat Daerah			
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Diberikan Tugas dan Fungsi yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	0 Orang 6 orang			0 Orang 6 orang	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	0 Orang 6 orang	250.000.000	Sekretariat Daerah			
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang			10 orang	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	10 orang	250.000.000	Sekretariat Daerah			
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang			10 orang	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	10 orang	250.000.000	Sekretariat Daerah			
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						8.150.000.000								
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300.000.000	Sekretariat Daerah		
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Perabotan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabotan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket			15 paket	3.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	15 paket	3.000.000.000	Sekretariat Daerah			
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	2 Paket	200.000.000	Sekretariat Daerah			
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	3.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	2 Paket	3.000.000.000	Sekretariat Daerah			
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	2 Paket	400.000.000	Sekretariat Daerah			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Kelompok Sesakan
										Nasional	Daerah		
4 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material Kegiatan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			2 Paket	200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Paket	200.000.000	Sekelastat Daerah
4 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			2 Laporan	400.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Laporan	400.000.000	Sekelastat Daerah
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4 Laporan	500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	500.000.000	Sekelastat Daerah
4 01 01 2.06 10	Penertarikan Anip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penertarikan Anip Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	50.000.000	Sekelastat Daerah
4 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan			1 Dokumen	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	100.000.000	Sekelastat Daerah
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.520.000.000						7.520.000.000	
4 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Disediakan			5 unit	2.000.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 unit	2.000.000.000	Sekelastat Daerah
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	"Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan"			2 unit	200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 unit	200.000.000	Sekelastat Daerah
4 01 01 2.07 04	Pengadaan Alat Angkut Darat dan Bermotor	Jumlah Unit Alat Besar Darat yang Disediakan			4 unit	20.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 unit	20.000.000	Sekelastat Daerah
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			20 unit	1.500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20 unit	1.500.000.000	Sekelastat Daerah
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			20 unit	1.500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20 unit	1.500.000.000	Sekelastat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tingkat 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah		
4.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Didislabakan			1 unit	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	1 unit	250.000.000	Sekretariat Daerah		
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didislabakan			15 unit	1.750.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	15 unit	1.750.000.000	Sekretariat Daerah		
4.01.01.2.08.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didislabakan			4 unit	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	4 unit	300.000.000	Sekretariat Daerah		
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Daerah					24.634.308.560					24.634.308.560			
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	1 Laporan	50.000.000	Sekretariat Daerah		
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didislabakan			4 Laporan	15.463.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	4 Laporan	15.463.600.000	Sekretariat Daerah		
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Reklamasi dan Perbaikan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Reklamasi dan Perbaikan Kantor yang Didislabakan			2 Laporan	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	2 Laporan	200.000.000	Sekretariat Daerah		
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didislabakan			2 Laporan	8.900.706.560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	2 Laporan	8.900.706.560	Sekretariat Daerah		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.010.000.000					7.010.000.000			
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Digunakan dan dibayarkan Pajak dan Perizinan			3 Laporan	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	3 Laporan	400.000.000	Sekretariat Daerah		
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Digelabakan			5 unit	1.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	5 unit	1.000.000.000	Sekretariat Daerah		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Utama/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
4 01 01 2 09 06	Perawatan/ Rehabilitasi Mesin Lainnya	"Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"			10 unit	60.000.000	REKONSTRUKSI ASLI DAERAH (PAD)		Pemertapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	10 unit	60.000.000	Sekretariat Daerah			
4 01 01 2 09 09	Perawatan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi"			24 unit	2.700.000.000	REKONSTRUKSI ASLI DAERAH (PAD)		Pemertapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	24 unit	2.700.000.000	Sekretariat Daerah			
4 01 01 2 09 10	Perawatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi			3 unit	210.000.000	REKONSTRUKSI ASLI DAERAH (PAD)		Pemertapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	3 unit	250.000.000	Sekretariat Daerah			
4 01 01 2 09 11	Perawatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25 unit	3.500.000.000	REKONSTRUKSI ASLI DAERAH (PAD)		Pemertapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	25 unit	3.500.000.000	Sekretariat Daerah			
4 01 01 2 11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2.827.698.998					2.827.698.998				
4 01 01 2 11 01	Penyediaan Gaji dan Pungutan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Pungutan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 orang / bulan	1.642.698.998	REKONSTRUKSI ASLI DAERAH (PAD)		Pemertapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	2 orang / bulan	1.642.698.998	Sekretariat Daerah			
4 01 01 2 11 02	Penyediaan Pakuan Divas dan Atribut Kolektif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakuan Divas dan Atribut Kolektif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			1 paket	345.000.000	REKONSTRUKSI ASLI DAERAH (PAD)		Pemertapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	1 paket	345.000.000	Sekretariat Daerah			
4 01 01 2 11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 orang	60.000.000	REKONSTRUKSI ASLI DAERAH (PAD)		Pemertapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	2 orang	60.000.000	Sekretariat Daerah			
4 01 01 2 11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 orang/bulan	780.000.000	REKONSTRUKSI ASLI DAERAH (PAD)		Pemertapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	2 orang/bulan	780.000.000	Sekretariat Daerah			
4 01 01 2 12	Facilities Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					1.385.000.000					1.385.000.000				
4 01 01 2 12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			1 paket	635.000.000	REKONSTRUKSI ASLI DAERAH (PAD)		Pemertapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	1 paket	635.000.000	Sekretariat Daerah			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun 2021	Prakiraan Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kategori Sarana	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Pemanggang Jarak
										Nasional	Daerah		TARGET	PAGU INDIKATIF	
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Kesehatan Masyarakat Kepada Masyarakat di Daerah yang Dihadirkan	Jumlah Paket Kesehatan Masyarakat Daerah yang Dihadirkan	1 paket		1 paket	460.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket			400.000.000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Kesehatan Masyarakat Kepada Masyarakat di Daerah yang Dihadirkan	Jumlah Paket Kesehatan Masyarakat Daerah yang Dihadirkan	1 paket		1 paket	350.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket			350.000.000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.13	Pembinaan Organisasi					1.740.000.000							1.740.000.000		
4 01 01 2.13 01	Pengembangan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengembangan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 dokumen		4 dokumen	440.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 dokumen			500.000.000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.13 02	Penyediaan Nelayan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan		1 Laporan	330.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan			350.000.000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	330.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen			350.000.000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.13 04	Monev, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		1 Dokumen	220.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen			250.000.000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.13 05	Kondisi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	420.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen			450.000.000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Probad dan Komunitas Pengaman					2.855.612.000							3.300.000.000		
4 01 01 2.14 01	Facilitasi Kepemimpinan	Jumlah laporan hasil Facilitasi kepemimpinan Masyarakat (Masi) Facilitasi Kepemimpinan	1 Laporan 0 Laporan		1 Laporan 0 Laporan	1.856.812.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan 0 Laporan			2.000.000.000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.14 02	Facilitasi Komunikasi Penggerak	Jumlah laporan hasil Facilitasi komunikasi Masyarakat (Masi) Facilitasi Komunikasi Penggerak	1 Laporan 0 Laporan		1 Laporan 0 Laporan	500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan 0 Laporan			750.000.000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.14 03	Pendukung Tugask Penggerak	Jumlah laporan pendukung tugas Masyarakat (Masi) Tugas Penggerak	1 Laporan 0 Laporan		1 Laporan 0 Laporan	500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan 0 Laporan			550.000.000	Sekretariat Daerah	
4 01 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN KEJUJUTERAPAN BAKSWAT					14.450.000.000							13.600.000.000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Pusat Peninggalan Jawab		
						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Target 2023		Pagu Infilatif	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Perintahan					650.000.000					800.000.000				
4 01 02 2.01 01	Perilaku Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Administrasi Pemerintahan				100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen		150.000.000	1 dokumen	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen		350.000.000	1 dokumen	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.01 03	Facilitas Pelaksanaan Gubernur Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitas Pelaksanaan				250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 dokumen		300.000.000	5 dokumen	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.02	Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Rakyat					12.200.000.000					11.000.000.000				
4 01 02 2.02 01	Facilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Facilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4.500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen		5.000.000.000	8 Dokumen	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Tata Kelola, Capaian Kinerja, dan Sifat Kelembagaan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan, Tata Kelola, Capaian Kinerja, dan Sifat Kelembagaan Sosial				3.200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen		3.500.000.000	12 Dokumen	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Tingkat Keseluruhan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Tingkat Keseluruhan Masyarakat				4.500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen		2.500.000.000	8 Dokumen	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.03	Facilitas dan Koordinasi					1.500.000.000					1.650.000.000				

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Kode	Usutan/Bidang Usutan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Program Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kategori Sasaran	Perencanaan Mula Rencana Tahun 2024		Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah	
4 01 02 2 01	Administrasi Tata Pemerintahan					650.000.000					860.000.000	
4 01 02 2 01 01	Perbaikan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Administrasi Pemerintahan	1 dokumen		1 dokumen	100.000.000	PENDANAAN ASLI DAERAH (PAD)		Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	1 dokumen	150.000.000	Sekretaris Daerah
4 01 02 2 01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Administrasi Kewilayahan	1 dokumen		1 dokumen	300.000.000	PENDANAAN ASLI DAERAH (PAD)		Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	1 dokumen	350.000.000	Sekretaris Daerah
4 01 02 2 01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Operasi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	5 dokumen		5 dokumen	250.000.000	PENDANAAN ASLI DAERAH (PAD)		Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	5 dokumen	300.000.000	Sekretaris Daerah
4 01 02 2 02	Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Ruang					12.200.000.000					11.000.000.000	
4 01 02 2 02 01	Fasilitasi Pengalihan Bina Mestaf Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengalihan Bina Mestaf Spiritual	8 Dokumen		8 Dokumen	4.500.000.000	PENDANAAN ASLI DAERAH (PAD)		Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	8 Dokumen	5.000.000.000	Sekretaris Daerah
4 01 02 2 02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kegiatan Sosial Masyarakat yang Meliputi Usaha Kecil, Menengah, dan Besar	12 Dokumen		12 Dokumen	3.200.000.000	PENDANAAN ASLI DAERAH (PAD)		Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	12 Dokumen	3.500.000.000	Sekretaris Daerah
4 01 02 2 02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Masyarakat yang Meliputi Usaha Kecil, Menengah, dan Besar	8 Dokumen		8 Dokumen	4.500.000.000	PENDANAAN ASLI DAERAH (PAD)		Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	8 Dokumen	2.500.000.000	Sekretaris Daerah
4 01 02 2 03	Fasilitasi dan Koordinasi					1.500.000.000					1.500.000.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikum Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Praktikum Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
4.01.03.2.02.01	Facilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah			5 Dokumen 0 Dokumen	17.787.214.862	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemertajaban Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	5 Dokumen 0 Dokumen	18.000.000.000	Sekretariat Daerah		
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tersekatnya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			3 Laporan	600.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemertajaban Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	3 Laporan	700.000.000	Sekretariat Daerah		
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan			3 Dokumen	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemertajaban Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	3 Dokumen	500.000.000	Sekretariat Daerah		
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					1.300.000.000					5.000.000.000			
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			250 Dokumen	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemertajaban Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	250 Dokumen	2.000.000.000	Sekretariat Daerah		
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Laporan Pengadaan Secara Elektronik			5 Dokumen	450.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemertajaban Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	5 Dokumen	1.500.000.000	Sekretariat Daerah		
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			15 Orang	350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemertajaban Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	15 Orang	1.500.000.000	Sekretariat Daerah		
4.01.03.2.04	Pemertajaban Kebijakan Sumber Daya Alam					300.000.000					450.000.000			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kegiatan Pendanaan				Kategori Suara	Rencana Kerja 2024		Penanggung Jawab	
						Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Daerah	Target		Pagu Indikatif
4 01 03 2 04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Perikanan, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen 1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemenuhan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	1 Dokumen 1 Dokumen	150.000.000	Sekretariat Daerah					
4 01 03 2 04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominrec, Perhubungan, Statistik, Perindustrian	1 Dokumen 1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemenuhan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	1 Dokumen 1 Dokumen	150.000.000	Sekretariat Daerah					
4 01 03 2 04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perindustrian	1 Dokumen 1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemenuhan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	1 Dokumen 1 Dokumen	150.000.000	Sekretariat Daerah					
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5														

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktis Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Penguasaan						Praktis Maju Rencana 2024		Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kategori Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
5 06	PEMERINTAHAN PERBATASAN					1,407,860,000							1,500,000,000		
5 06 02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					1,407,860,000							1,500,000,000		
5 06 02 2.02	Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan					1,407,860,000							1,500,000,000		
5 06 02 2.02 04	Pengajuan dan Penyerahan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dipaja dan Dipelihara				1,407,860,000	1 dokumen	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemertajuan Tata Kada Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern		1 dokumen	1,500,000,000	Sekretariat Daerah	
TOTAL						115,893,894,430							122,237,087,558		

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra PD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini memuat Tujuan dan Sasaran Pencapaian Misi, Program dan Usulan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta selain menjadi Acuan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat Daerah. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen beserta seluruh staf Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

Purwakarta, 2022

**PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

NORMAN NUGRAHA
Pembina Utama Muda
NIP. 19831117 200604 1 009

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

Purwakarta, 2022

**PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

NORMAN NUGRAHA
Pembina Utama Muda
NIP. 19831117 200604 1 009

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

Purwakarta, 2022

**PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

NORMAN NUGRAHA
Pembina Utama Muda
NIP. 19831117 200604 1 009